

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Kenis (1979) dalam Suhartono & Solichin (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran dan salah satu karakteristik tersebut adalah kejelasan sasaran anggaran.

1. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan, arah dan kebijakan umum APBD yang pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) yang akan dicapai oleh daerah dalam tahun anggaran tertentu Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (2001) dalam Abdullah (2005). Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban atas

“*where do we want to be*” dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Abdullah (2005) menyatakan bahwa tujuan dan sasaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut: (1) Spesifik, artinya sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya. (2) Terukur, artinya sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya. (3) Menantang tapi realistis, artinya sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai. (4) Berorientasi pada hasil akhir, artinya sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya, dan (5) Memiliki batas waktu, artinya sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Menurut Kenis (1979) dalam Indraswari (2010) adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Selanjutnya, target-target anggaran yang

disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Aparat akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Selanjutnya, hal ini akan menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Indraswari (2010) menyatakan bahwa penelitian-penelitian tentang kejelasan sasaran anggaran dengan dampaknya masih sedikit. Penelitian mengenai hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan dampaknya yang terfokus pada sektor publik diantaranya Locke (1967) dalam Kenis (1979) dan Kenis (1979), Emile (2004), Abdullah (2004). Penelitian Locke (1967) dalam Kenis (1979) dan Kenis (1979) menunjukkan hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja manajerial dengan hasil yang signifikan. Demikian juga, penelitian Emile (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintah daerah. Hal ini didukung penelitian Abdullah (2004) yang mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian terdapat tidak konsistennya hasil penelitian. Penelitian Adoe (2002) dalam Suhartono dan Solichin (2007) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial. Jumirin (2001) dalam Suhartono dan Solichin (2007) mengatakan tidak terdapat hubungan yang

signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah..

2. Pengendalian Akuntansi

Perubahan struktur APBD merupakan bagian dari beberapa komponen dan istilahnya, sedangkan orientasinya hanya dari *input* berubah menjadi *output* dan *outcome*. Fokus APBD juga berubah dari pertanggungjawaban administrasi menjadi pertanggungjawaban akuntansi sehingga pembukuannya berubah dari *single entry* menjadi *double entry*. APBD yang baru hanya untuk anggaran desentralisasi. Secara teoritis dan hasil penelitian empiris Desentralisasi menyebabkan semakin dibutuhkannya sistem pengendalian akuntansi (Miah & Mia, 1996 dalam Emile & Halim, 2005).

Menurut Hansen & Mowen (1997) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Maddox (2000) dalam Abdullah (2005) pengendalian adalah sebuah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien.

Menurut Hapwood (1976) dalam Faisal & Kusuma (2002) pengendalian akuntansi merupakan pengendalian yang berdasarkan pada angka-angka akuntansi seperti anggaran, *standard costing*, dan *fleksibel budgeting*. Pengendalian sangat berguna untuk meningkatkan pencapaian kinerja.

Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep ekonomis, efisien, dan efektif saling berhubungan satu sama lain tidak dapat diartikan atau dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomis memastikan bahwa biaya *input* yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan, konsep efisien memastikan bahwa *output* yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat Mardiasmo (2002) dalam Pratolo (2003).

Anthony (1999) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa pengendalian finansial dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (1) pengendalian finansial dengan sistem akuntansi (*financial control via the accounting system*); dan (2) pengendalian dengan pengauditan (*financial control via auditing*). Machintosh (1994) dalam Abdullah (2005) menyatakan bahwa sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme kontrol keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan para manajer dan karyawan di suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Inpres No.7/1999). Tujuan dan sasaran sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya (Inpres No.7/1999).

Akuntabilitas kinerja instansi merupakan salah satu syarat mutlak dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) Sugijanto (2002). Prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan ekonomi.
2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kebijakan ekonomi dan sosial yang baik serta pertanggungjawaban keuangan yang baik.
3. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis dan pengakuan hak atas kebebasan manusia atau hak azasi manusia, adanya kebebasan pers, dan kebebasan ekspresi aspirasi masyarakat.

Abdullah (2005) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan

pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada *stakeholdernya*. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD dan kinerja keuangan (*financial performance*) secara terbuka, dapat dimengeti oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Terkait dengan akuntabilitas pemerintah daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban kepada daerah yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban kepada daerah dimana pertanggungjawaban terdiri dari: (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan, dan (3) Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Lembaga Administrasi Negara (LAN-2003) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang lebih ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*process*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

4. Kinerja Manajerial

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok dan yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan individu maupun kelompok adalah tujuan target yang hendak dicapai sebuah organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara menurut Lohman (2003) dalam Mahsun (2006) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Berdasarkan berbagai definisi, maka dapat disimpulkan elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
4. Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas).

Riyanto L.S (2003) dalam Emile (2004) menyatakan kinerja pada suatu organisasi dapat dibagi menjadi 3 yaitu, kinerja keuangan, kinerja operasional dan kinerja manajerial. Dalam penelitian ini menggunakan kinerja manajerial. Kinerja manajerial didefinisikan sebagai kinerja para individu anggota

organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi dan representasi (Mahoney *et.al.*, 1963 dalam Nugroho, 2003).

. Tindakan ini mengukur tingkat keberhasilan pemimpin dan para manajer (Mohamad dan Mustofa, 1992 dalam Pratiwi, 2008). Supervise/pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Pengawasan juga memerlukan ditetapkannya sasaran, standar, dan tujuan tertentu (Basu, 2000). Penyusunan personalia (*staffing*) adalah penarikan (*recruitment*), latihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif (Hani, 1995).

B. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah di tetapkan sebelumnya. Penelitian Abdullah (2005) menyatakan apabila sasaran anggaran dibuat secara jelas maka para pelaksana akan lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara

memberikan pelaporan kepada pihak stakeholder secara terbuka dan transparansi sehingga akuntabilitas kinerja yang baik dapat tercipta.

Pelaksanaan anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisien biaya pada pelaksanaan anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas (Kenis, 1979) dalam Suhartono & Solichin (2007).

Penelitian Locke (1968) & Kenis (1979) dalam Suhartono & Solichin (2007) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku karyawan. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti. Demikian juga, penelitian Emile (2004) mendukung adanya hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja dalam konteks pemerintahan.

Penelitian yang berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, Abdullah (2005) meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Jumirin (2001) dalam

Suhartono dan Solichin (2007) mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauhmana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mencapainya. Sasaran yang tidak jelas atau membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi. Namun sebaliknya, jika kejelasan sasaran anggaran dinyatakan secara jelas maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin meningkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikembangkan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2. Hubungan Pengendalian Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Emile (2004) menyatakan suatu anggaran walaupun telah disusun secara komprehensif dan rinci serta melalui penyusunan yang akurat, biasanya pada saat pelaksanaan anggaran tersebut sering mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang tidak diperhatikan sebelumnya. Untuk mengetahui dan menghindari penyimpangan tersebut maka diperlukan peran pengendalian

akuntansi. Dengan adanya pengendalian tersebut manajer dapat melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Penggunaan sistem pengendalian akuntansi dapat mempermudah perencanaan dan pengawasan kegiatan dan kinerja organisasi. Martin (1994) dalam Nazaruddin (2003) menyatakan bahwa tujuan dari informasi akuntansi membantu memudahkan penilaian dan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi (Macintosh, 1994 dalam Emile & Halim, 2005).

Miah & Goyal (1990) dalam Emile & Halim (2005) menyatakan bahwa sistem akuntansi yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa kegagalan menggunakan informasi akuntansi yang diperlukan mengakibatkan manajemen sumber daya yang tidak efektif serta kemunduran perlahan-lahan dalam kinerja organisasi (Cushing & Romney, 1994 dalam Nazaruddin, 2003). Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan peningkatan kinerja organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktivitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik.

Dalam penelitian Abdullah (2005) meneliti pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasilnya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Andi (2008) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah ditingkat satuan kerja perangkat daerah.

Ekonomis, efisien, dan efektifitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian semakin tinggi pengendalian akuntansi yang diterapkan kepada aparat pemerintah akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah semakin meningkat. Maka hipotesis kedua dari penelitian ini adalah:

H₂: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

3. Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja Manajerial

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauhmana sasaran anggaran dinyatakan secara spesifik, jelas, dan dapat dipahami oleh mereka yang bertanggungjawab mencapainya. Sasaran yang tidak jelas atau

membingungkan dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan para pelaksana, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi.

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang baik perlu adanya kejelasan mengenai sasaran anggaran yang ingin di capai. Pencapaian ini terkait dengan kinerja manajerial. Dimana dengan kinerja manajerial yang baik akan dapat membantu para pegawai dalam menentukan arah dan tujuan sasaran anggaran yang diharapkan. dengan kata lain, akuntabilitas kinerja akan dipengaruhi oleh jelasnya sasaran anggaran yang di buat dan kinerja yang baik dalam suatu organisasi.

Beberapa penelitian berkaitan tentang kejelasan sasaran anggaran sering dilakukan oleh beberapa peneliti seperti, penelitian Ormond dan Loffler (2002) dalam wahyudi (2009) menunjukkan pengukuran kinerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Penelitian Wahyudi (2009) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui kinerja manajerial. Dan Penelitian Emile (2004) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Frucot (1991) dan Wentzel (2002) dalam Irfansyah (2003) menyatakan kinerja berperan sebagai pemoderasi dalam kaitan anggaran dengan dampaknya.

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah

ditetapkan. Penelitian Abdullah (2005) terkait dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja yang baik dari aparat pemerintah daerah akan berimplikasi pada akuntabilitas terhadap penyusunan anggaran pemerintah. Dengan demikian, semakin jelas sasaran anggaran yang diterapkan aparat pemerintah daerah dan didorong oleh kinerja manajerial yang tinggi, akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H₃: Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

4. Hubungan Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Manajerial

Pengendalian akuntansi merupakan salah satu selain kejelasan sasaran anggaran yang mengalami perubahan sangat mendasar dalam lingkup sektor publik. Pengendalian akuntansi merupakan proses dengan menggunakan sistem akuntansi untuk membuat tujuan dari organisasi menjadi terarah dan dapat tercapai, salah satu tujuan dari organisasi adalah meningkatkan

akuntabilitas kinerja. Agar pengendalian dalam sebuah organisasi dapat berjalan efektif maka perlunya adanya kinerja yang baik dalam organisasi. Dengan kata lain untuk mencapai akuntabilitas yang didorong oleh pengendalian akuntansi maka perlu adanya kinerja yang tinggi dalam sebuah organisasi tersebut.

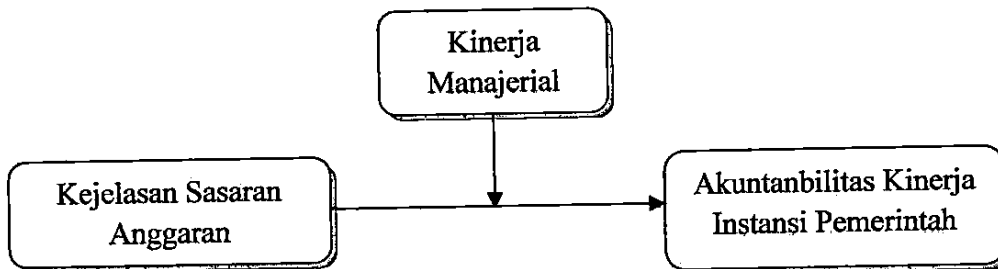
Penelitian Miah dan Mia (1996) dalam Irfansyah (2003) meneliti kontrol evaluasi kinerja yang dihasilkan oleh sistem pengendalian akuntansi, hasilnya menunjukkan penggunaan sistem pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Dalam penelitian Wahyudi (2009) menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui kinerja manajerial. Penelitian Martin dalam Ietje (2003) menyatakan bahwa tujuan dari informasi akuntansi membantu memudahkan penilaian dan pengambilan keputusan bagi para penggunanya.

Lingkup anggaran dan akuntansi menjadi relevan untuk diteliti lebih jauh berikut dampaknya terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepada publik. Adanya pengendalian akuntansi dan kinerja yang baik dalam suatu organisasi akan berimplikasi tercapainya akuntabilitas. Dengan demikian semakin tinggi pemahaman aparat pemerintah terhadap pengendalian akuntansi dan didorong kinerja yang tinggi, akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Maka hipotesis keempat dari penelitian ini adalah:

H₄: Interaksi antara pengendalian akuntansi dan kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

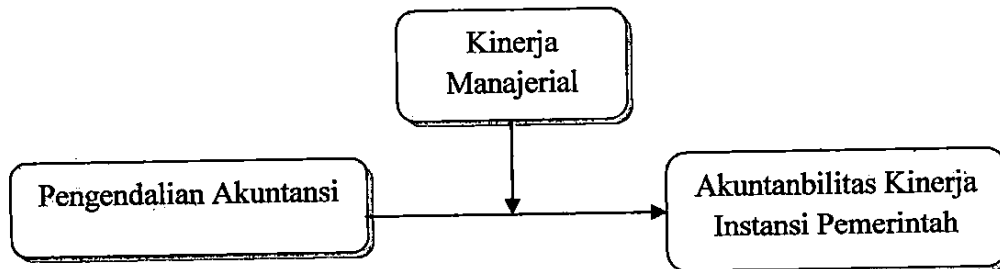
C. Model Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1.

Interaksi antara kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah



Gambar 2.2.

Interaksi antara pengendalian akuntansi dan kinerja manajerial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah